

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

Gerdian Hadi Surya¹, Denny Hernawan², Euis Salbiah³

¹Universitas Djuanda Bogor, gerdisurya@gmail.com

²Universitas Djuanda Bogor, dennyhermawan@unida.ac.id

³Universitas Djuanda Bogor, euis.salbilah.adn@unida.ac.id

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang dimulai sejak tahun 2007. Program ini untuk memberi pertolongan kepada rumah tangga miskin (RSTM) atau keluarga sangat miskin (KSM), asalkan memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan. Studi untuk melihat bagaimana program keluarga harapan diterapkan di kecamatan cigombong dengan mengurangi kemiskinan. Teori implementasi George Edward III terdiri dari elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Widodo, 2011). Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode deskriptif. Analisis data dilakukan menggunakan skor rata-rata weigth mean score (WMS). Metode penarikan sampel menggunakan metode random sampling. Hasil analisis skor rata-rata berat (WMS) menunjukkan bahwa pelaksanaan (PKH) telah dilaksanakan dengan baik dan menerima nilai rata-rata 3,88. Hasil ini menunjukkan bahwa program tersebut dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi.Program.Program Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur urusan didalam negeri serta bertanggung jawab dalam melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya terdapat masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sandang dan pangan.

Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya selain makanan dianggap miskin berdasarkan pengeluaran bulannya, menurut badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan adalah batas atas pengeluaran.

Gambar 1.1



Sumber: Badan Pusat Statistika 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas Indonesia memiliki 26,36 juta penduduk miskin per September 2022, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,57%. Negara ini memiliki populasi 29,25 juta orang pada tahun 2012, dan tingkat kemiskinan 11,96%. Selanjutnya, angka kemiskinan menurun menjadi 9,22% pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 24,78 juta jiwa, namun meningkat kembali menjadi 10,19% pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 27 jiwa.

Table 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bogor

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2017	487,30
2018	415,02
2019	395,03
2020	465,67
2021	491,24
2022	474,74

Sumber: Badan Pusat Statistika 2023

Pada Table 1.1 menunjukkan pada tahun 2017 sampai 2020 kemiskinan di kabupaten Bogor mengalami penurunan dari 487,30 ribu orang menjadi 465,67 ribu orang dan pada tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 491,24 ribu orang dan kembali menurun pada 2022 dengan jumlah 474,74 ribu orang. Dari penjelasan ini bahwa kemiskinan di Indonesia cukup tinggi, oleh karena itu pemerintah harus serius dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam menangani kemiskinan tentunya pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat merasa terjamin, aman dan nyaman berada di negaranya. Oleh karena itu Kementerian Sosial Republik Indonesia menggagas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Tahun 2007 program keluarga harapan telah berjalan namun belum dapat membantu keluarga miskin secara menyeluruh sehingga hanya dilakukan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diinput ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan membutuhkan, hal tersebut telah diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018. Mengurangi masyarakat miskin merupakan tujuan jangka pendek PKH. Terakhir, adanya akses terhadap layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan akan mengubah perilaku masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuat generasi penerus menjadi lebih pintar dan

Table 1.2

**Data Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan
Kecamatan Cigombong**

NO	NAMA DESA	JUMLAH KPM
1	CIADEG	330
2	CIBURAYUT	412
3	CIBURUY	294
4	CIGOMBONG	273
5	CISALADA	267
6	PASIR JAYA	322
7	SROGOL	140
8	TUGU JAYA	333
9	WATES JAYA	158
	TOTAL KESELURUHAN	2529

Sumber: Kantor Kecamatan Cigombong.

mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan utama dari program ini.

Berdasarkan table 1.2, bisa dilihat bahwa KPM Kecamatan Cigombong berjumlah 2529 KPM. Hal ini menjadi alasan mengapa Kecamatan Cigombong perlu mendapatkan penerapan bantuan PKH karena banyaknya Masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan membantu kesejahteraan masyarakat miskin. Di antara masalah yang dapat menghambat implementasi Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut: pendamping tidak memberikan perhatian yang cukup kepada KPM yang seharusnya telah menyelesaikan studi mereka; kekurangan pendamping, atau pelaksana yang menjalankan program, dan banyaknya KPM yang tidak memahami dengan baik tentang program.

Penelitian ini ingin mengidentifikasi masalah berikut: bagaimana Program Keluarga Harapan diterapkan untuk menurunkan kemiskinan di Kecamatan Cigombong, masalah apa yang ditimbulkan serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah .

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan upaya Kecamatan Cigombong dalam menerapkan Program Keluarga Harapan Penanggulangan Kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Implementasi adalah proses atau langkah-langkah dasar yang dilakukan untuk melaksanakan atau melaksanakan suatu kebijakan, rencana, atau program yang direncanakan. Implementasi berarti mengintegrasikan ide dan konsep ke dalam situasi praktis. (Alfitri & Dahlan, 2022).

Dilihat dari pengertian yang global, implementasi bisa merujuk pada pemantauan dan evaluasi implementasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai, bekerja sama dengan pemangku kepentingan, memilih dan menggunakan sumber daya yang diperlukan, dan membuat rencana. Implementasinya biasanya memerlukan anggaran, pelatihan, dan komunikasi yang baik. (Suherman, 2021).

Sebaliknya, ulasan sering dikaitkan dengan program. Analisis merupakan suatu entitas atau unit kegiatan yang secara rutin melaksanakan atau melaksanakan suatu kebijakan dalam suatu organisasi dan melibatkan sekelompok individu. (Suharsimi Arikunto (2004: 2).

Tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, pemerintah, atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tertentu dikenal sebagai implementasi kebijakan. (Van Meter dan Van Horn (1975).

Dalam penelitian ini terdapat 4 dimensi yaitu : 1. Komunikasi, 2. Sumber Daya, 3. Disposisi dan 4. Strukturi birokrasi

Pendekatan deskriptif kuantitatif, tanpa perbandingan dengan variabel independen lainnya, digunakan dalam penelitian ini. (Sugiyono 2017: 7).

Penelitian ini melihat 2.529 penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan 96 KPM sebagai sampel, menggunakan rumus Taro Yamane.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode penelitian lapangan, yang mencakup observasi, wawancara, dan angket. Data kuesioner akan diproses serta dijabarkan memakai rumus Weight Meani Score (WMS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil rician dari penyebaran kuesioner mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menangulangi Kemiskinan Di Kecamatan Cigombong dapat dilihat dalam empat dimensi yaitu :

Rekapitulasi Dimensi Komunikasi

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Informasi mengenai PKH mudah dimengerti oleh masyarakat	3,22	Cukup Baik
2	Pendamping menjelaskan dengan jelas terkait PKH kepada masyarakat	4,06	Baik
3	Pendamping memberikan informasi secara konsiten dalam penyaluran informasi	4,04	Baik
Jumlah		3,77	Cukup Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024.

Dengan demikian, secara Keseluruhan rekapitulasi dimensi komunikasi menunjukkan hasil yang masuk dalam kriteria “Cukup Baik” Dengan nilai 3,77. Hal tersebut dilihat dari Nilai rata-rata dari setiap indikator yang ada dalam dimensi komunikasi yang meliputi informasi mengenai PKH mudah dimengerti oleh masyarakat, pendamping menjelaskan dengan jelas terkait PKH pada masyarakat dan pendamping memberikan informasi secara konsisten.

Rekapitulasi dimensi Sumber Daya

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Jumlah pendamping sudah cukup dalam melaksanakan PKH	3,54	Cukup Baik
2	Pendamping memberikan informasi pengarah dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan	4.27	Baik
3	Pendamping diberi wewenang dalam melaksanakan PKH	3,71	Baik
4	Tersedia Sarana dan prasarana dalam PKH	3,63	Baik
Jumlah		3,79	Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2024

Oleh karena itu, rekapitulasi Dimensi Sumber Daya menghasilkan hasil yang memenuhi kriteria "Baik" secara keseluruhan, dengan nilai 3,75. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata dari setiap indikator dimensi sumber daya, yang mencakup jumlah pendamping yang sudah cukup dalam melaksanakan PKH, pemberian informasi pengarah dan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, pemberian wewenang kepada pendamping untuk melaksanakan PKH, dan ketersediaan sarana.

Rekapitulasi Dimensi Disposisi

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Sikap para pendamping sudah baik dalam melaksanakan PKH	3,90	Baik
2	Pendamping sudah menerima kebijakan sampai masyarakat sudah mandiri dalam pemanfaatan PKH	4.04	Baik
Jumlah		3,96	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Oleh karena itu, rekapitulasi Dimensi Disposisi menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria "Baik" dengan nilai 3,96. Nilai rata-rata dari setiap indikator dimensi disposisi, yang mencakup sikap para pendamping tentang menjalankan PKH dengan baik dan menerima kebijakan sampai masyarakat dapat memanfaatkannya secara mandiri, menunjukkan hasil yang baik.

Rekapitulasi Dimensi Struktur Birokrasi

No	Item Pernyataan	Mean	Kriteria Penilaian
1	PKH sudah memiliki SOP yang jelas dan dilaksanakan dengan baik	4,04	Baik
2	Pendamping PKH bertanggung jawab dalam melaksanakan program	3,97	Baik
Jumlah		4,01	Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2024.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, rekapitulasi Dimensi Disposisi menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria "Baik" dengan nilai 4,01. Ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata setiap indikator dalam dimensi struktur birokrasi, yang meliputi PKH, yang memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan dilaksanakan dengan baik, dan pendamping PKH yang bertanggung jawab untuk menjalankan program.

Hasil rekapitulasi dari empat dimensi implementasi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) menunjukkan bahwa program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan di kecamatan cigombong kabupaten bogor telah dilaksanakan dengan "Baik" dengan nilai 3,88.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil rekapitulasi dari variabel implementasi program keluarga harapan menunjukan hasil akhir berdasarkan responden KPM dengan Nilai 3,88 (Baik).

Dimensi tertinggi erada di dimensi yang sama yaitu dimensi struktur birokrasi dengan nilai 4,01 (baik). Dan dimensi terendah menurut responden KPM yaitu dimensi komunikasi dengan nilai 3,77 (baik).

1. Adapun hambatan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan di kecamatan cigombang kabupaten bogor.
 - a. Kurangnya sosialisasi secara merata dan kurangnya partisipasi KPM mengikuti P2K2 sehingga KPM tidak mengerti tujuan PKH.
 - b. Kurang tegasnya pendamping dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pendamping dalam mendorong KPM agar Graduasi.
 - c. Banyaknya KPM kurang memahami tujuan dari program keluarga harapan
 - d. Kurangnya saran dan prasaran saat pendamping melakukan sosialisasi,
2. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan program keluarga harapan dalam menanggulangi kemiskinan di kecamatan cigombang kabupaten bogor.
 - a. Pendamping memastikan semua KPM mengerti tujuan Program keluarga harapan
 - b. Pendamping waji mengontrol ekonomi KPM agar supaya isa mendorong KPM melakukan Graduasi
 - c. Meningkatkan jumlah sumer daya pendamping
 - d. Mempunyai sarana dan prasarana

Saran

Berdasarkan Hasil pembahasan maka peneliti memberikan beberapan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dan masukan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam komunikasi, kepada unsur pelaksana PKH untuk memastikan lagi ahwa sosialisasi sudah didapat secara menyeluruh dengan leih meningkatkan lagi partisipasi KPM dan juga memastikan ahwa KPM mengerti dengan tujuan PKH.
2. Dalam melaksanakan wewenang , pelaksana PKH harus leih tegas danmendorong KPM agar melakukan graduasi.
3. Staf, pelaksana PKH harus mingkatkan lagi sumBer daya manusia pendamping agar mempermudah dan melancarkan kegiatan PKH.

REFERENSI

Jurnal :

- Yuliani, R., Denny Hernawan, & Faisal Tri Ramdani. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 2(1),
- Puspita, A., Mulyadi, A., & Amirulloh, M. R. . (2023). Implementation Of One-Day Service Program Of Death Certificate. *Jurnal Governansi*, 9(2), 103–120.

Landasan Hukum:

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 19 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Buku:

- Arikunto, Suharsimi (2014). *Evaluasi program pendidikan: pedoman teoritis praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Buku pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH). 2008
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.